

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (Tiongkok) dikenal sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar saat ini. Pada tahun 2018, International Monetary Fund (IMF) mengeluarkan data tujuh ekonomi terbesar di dunia yang pada urutan pertama diduduki oleh AS dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar \$19,4 triliun, dan urutan kedua diduduki oleh Tiongkok dengan PDB sebesar \$11,9 triliun.<sup>1</sup> Selanjutnya prestasi ekonomi kedua negara yaitu AS telah menyumbang seperempat dari perekonomian dunia, sementara Tiongkok merupakan negara dengan aktivitas ekspor terbesar di dunia saat ini.<sup>2</sup>

AS dan Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi satusama lain hingga saat ini. Bagi Tiongkok, AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar di tahun 2018. Sedangkan bagi AS, Tiongkok merupakan pemasok barang utama AS dengan menyumbang 18% impor barang pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar AS dengan total perdagangan sebesar \$559,2 miliar.<sup>3</sup> Sedangkan pada tahun 2021 hingga 2022, ekspor AS ke

---

<sup>1</sup> International Monetary Fund, "World Economic Outlook, October 2017", diakses melalui <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017> pada 6 November 2022.

<sup>2</sup> International Monetary Fund, "China: Fastest Growing Consumer Market in the World", diakses melalui <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2013/12/02/china-fastest-growing-consumer-market-in-the-world> pada 13 November 2022.

<sup>3</sup> Office of the United States Trade Representative, "The People's Republik of China", diakses melalui <https://ustr.gov/issue-areas/economy-trade> pada 12 November 2022.

Tiongkok mencapai \$259,8 miliar yang membuat Tiongkok menjadi negara ke-3 terbesar penerima ekspor barang dari AS.

Eksistensi AS sebagai negara *super power* semakin terancam oleh Tiongkok yang telah mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi yang dijuluki sebagai negara *emerging economic power*. Pada tahun 2018, ekonomi AS terus mengalami penurunan yang salah satunya diakibatkan oleh defisitnya perdagangan AS terhadap Tiongkok. Pada tahun itu, AS lebih banyak mengimpor barang dari Tiongkok dibanding mengekspor barang ke Tiongkok. Terlihat pada tahun tersebut defisit perdagangan barang AS dengan Tiongkok mencapai \$419,2 miliar yang didominasi oleh defisit pada produk manufaktur.<sup>4</sup> Tak hanya itu, AS juga menduga adanya praktik perdagangan yang tidak adil yang dilakukan oleh Tiongkok serta pencurian hak kekayaan intelektual AS oleh Tiongkok yang menyebabkan AS semakin

Semakin berkembangnya dominasi Tiongkok dan mengancam *super power* AS serta adanya defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok membuat Donald Trump (Trump) menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan berbagai macam kebijakan yang sesuai dengan retorikanya yaitu *America First: Make America Great Again* yang dinilai sangat realistis. Salah satu dari kebijakan tersebut yaitu proteksionisme. Proteksionisme Trump berupa pemberlakuan kenaikan tarif terhadap produk dari Tiongkok agar perdagangan AS terhadap Tiongkok tidak mengalami kerugian. Kebijakan proteksi merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melakukan pembatasan impor atau ekspor yang bertujuan untuk

---

<sup>4</sup> Statistika, "U.S. imports – top trading partners 2021", diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/186601/ranking-of-the-largest-trading-partners-for-us-imports/> pada 12 November 2022.

melindungi industri dalam negeri dan memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk kebijakan proteksi AS tersebut yaitu dengan adanya pemberlakuan kenaikan tarif AS terhadap Tiongkok sebesar 30% pada produk solar panel asal Tiongkok. Selain itu, AS juga mengenakan tarif impor baja sebesar 25% dan aluminium sebesar 10% untuk produk yang berasal dari Tiongkok.<sup>5</sup> Melihat hal itu, Tiongkok membalas tindakan tersebut dengan berbagai kebijakan balasan, yaitu salah satunya dengan ikut menaikkan tarif terhadap beberapa produk dari AS.

Perang dagang dapat diartikan sebagai perselisihan perdagangan yang terlihat dari kegiatan balas-membalas kebijakan tarif impor yang terjadi antara kedua negara yang sedang melakukan perdagangan.<sup>6</sup> Perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok merupakan bentuk respon AS terhadap defisit perdagangannya terhadap Tiongkok. Perang dagang yang diinisiasi oleh AS bukan hanya didasarkan pada alasan ekonomi yang dirasa merugikan AS, tetapi juga disebabkan dari aspek politik, militer, dan teknologi, dimana Tiongkok sebagai *emerging economic power* sedang giat melakukan pengembangan dan modernisasi. Akan tetapi, upaya modernisasi Tiongkok tersebut dianggap sebagai ancaman untuk keberlangsungan kekuatan AS di sistem internasional. Oleh karena itu, melalui perang dagang AS menerapkan kebijakan proteksionisme untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Namun kebijakan AS dalam penaikan tarif tidak sesuai dengan tujuan awal AS, dimana kebijakan proteksi yang diberlakukan AS terhadap produk ekspor

---

<sup>5</sup> Office of the United States Trade Representative, "USTR Finalizes Tariff on \$200 Billion of Chinese Imports", diakses melalui <https://ustr.gov/issue-areas/economy-trade> pada 12 November 2022.

<sup>6</sup> Surender Mor, "US-China Trade War: Learning by Doing", In book: Culture of Learning and Experimentation for well-being (pp. 184-190), Bloomsbury.

Tiongkok tidak memperlihatkan keberhasilan, atau tidak membuat neraca perdagangan AS menjadi surplus terhadap Tiongkok. Dengan kata lain, kebijakan proteksi tersebut tidak efektif dalam mencapai tujuannya yang terlihat dari semakin defisitnya neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok. Defisitnya perdagangan AS terhadap Tiongkok tersebut terlihat dari semakin besarnya produk impor Tiongkok yang masuk ke AS, dan berkurangnya ekspor AS ke Tiongkok setelah kebijakan proteksionisme dalam perang dagang tersebut diberlakukan.

Sebelum dan sesudah AS memberikan tarif tinggi terhadap produk Tiongkok, neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok tetap mengalami defisit. Defisitnya neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok terlihat dari besarnya jumlah impor AS dari Tiongkok, dibanding ekspor AS ke Tiongkok. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok.

**Tabel 1.1 Trade Balance AS dan Tiongkok (2018 – 2021)**

| Tahun | Ekspor AS ke Tiongkok (US\$) | Impor AS dari Tiongkok (US\$) |
|-------|------------------------------|-------------------------------|
| 2018  | 120.34                       | 539.5                         |
| 2019  | 106.63                       | 425.24                        |
| 2020  | 124.6                        | 435.4                         |
| 2021  | 151.07                       | 506.37                        |

Sumber : U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa AS terus mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok. Dengan adanya perang dagang dan kebijakan proteksi yang diterapkan oleh AS terhadap Tiongkok, hal ini bertujuan untuk membawa perekonomian AS ke arah yang lebih baik. Namun perekonomian AS

justru terus mengalami kemerosotan yang telah ditandai dengan defisitnya neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok seperti yang terlihat pada tabel. Tidak efektifnya kebijakan proteksi dan semakin tingginya defisit perdagangan juga berimbas pada menurunnya perekonomian AS. Hal ini sesuai dengan pendapat Jiakun Jack Zhang yang melihat bahwa kebijakan proteksi yang diberlakukan oleh Trump menyebabkan kerugian bagi ekonomi AS. Jiakun Jack Zhang juga menyatakan bahwa tariff bagian 301 yang diterapkan oleh AS mengalami kegagalan dan tidak terlihat manfaat strategisnya.<sup>7</sup> Hal ini didukung oleh data menurut IMF, dimana pertumbuhan ekonomi AS mengalami perlambatan pada tahun 2019 yaitu 2,1% dan terus mengalami penurunan hingga 2,0% pada tahun 2020. Sedangkan PDB AS mengalami penurunan dari 2,3% pada tahun 2019 dan 1,9% pada tahun 2020. Pada tahun 2022, PDB riil AS turun sebanyak 1,6% di kuartal satu dan 0,9% di kuartal dua.<sup>8</sup>

Namun disisi lain, Tiongkok mengalami peningkatan ekonomi selama perang dagang. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 6,1% pada tahun 2019, dan terus bertahan sebesar 6% hingga tahun 2020 meskipun dalam situasi perang dagang dengan AS.<sup>9</sup> Pada tahun 2021, PDB Tiongkok mengalami kenaikan sebesar 8,1%. Selain itu, pertumbuhan PDB Tiongkok pada kuartal III tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,9 persen.<sup>10</sup> Melalui data-data tersebut, terlihat

---

<sup>7</sup> Jia Kun Jack Zhang, "The U.S.-China Trade War and the Tariff Weapon", 2021-22 Wilson China Fellowship, Asia Program.

<sup>8</sup> Bureau of Economic Analysis, "Gross Domestic Product, Second Quarter 2022 diakses melalui <https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-second-quarter-2022-advance-estimate> pada tanggal 1 November 2022.

<sup>9</sup> CNBC, "China's says its economy grew 6.1% in 2019, in line with expectations", diakses melalui <https://www.cnbc.com/2020/01/17/china-gdp-for-full-year-and-q4-2019.html> pada 9 November 2022.

<sup>10</sup> Trading Economics, "China Annual Growth Rate" diakses melalui <https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual> pada tanggal 2 November 2022.

bahwa Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari tahun ke tahun selama berlangsungnya perang dagang.

Pada perang dagang antara AS dan Tiongkok yang dimulai sejak 2018, terlihat AS mengalami defisit neraca perdagangan yaitu besarnya impor AS dari Tiongkok. Hal ini berdampak pada penurunan ekonomi AS. Sementara Tiongkok mengalami surplus dalam neraca perdagangan terhadap AS dan terdapatnya peningkatan ekonomi Tiongkok. Padahal tujuan awal AS dalam hal ini adalah untuk menghambat produk yang berasal dari Tiongkok untuk memasuki pasar AS, dan membuat neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok menjadi surplus. Namun yang terjadi AS tetap mengalami defisit perdagangan terhadap Tiongkok dan berlanjut terhadap permasalahan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna melihat apa penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada saat terjadinya perang dagang AS – Tiongkok 2018.

## **1.2 Rumusan Masalah**

AS dan Tiongkok merupakan dua negara yang menjadi mitra dagang terbesar bagi satu sama lain. Perang dagang pada tahun 2018 yang terjadi antara AS dan Tiongkok nyatanya tidak memberikan dampak yang baik bagi ekonomi AS. Hal ini terlihat dari adanya penurunan ekonomi AS yang terlihat dari defisitnya neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok. Perang dagang yang terjadi pada tahun 2018 dan segala kebijakan proteksi yang dilakukan oleh AS terhadap Tiongkok ditujukan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh AS agar neraca perdagangannya surplus terhadap Tiongkok, serta juga membendung meningkatnya ekspor Tiongkok di pasar AS. Meskipun demikian, faktanya neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok mengalami defisit, dimana kebijakan proteksi

dan pengenaan tarif dalam perang dagang tidak membuat ekspor Tiongkok turun. Dengan kata lain, kebijakan proteksi yang diberlakukan oleh AS terlihat kurang efektif dalam mencapai tujuannya, sehingga yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ekspor Tiongkok mengalami kenaikan yang signifikan dan neraca perdagangan Tiongkok mengalami surplus terhadap AS. Tidak efektifnya kebijakan proteksi AS dan defisitnya neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok juga berdampak pada turunnya PDB AS dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat apa yang menyebabkan tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada saat terjadinya perang dagang AS – Tiongkok 2018.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan yang akan penulis jawab dalam penelitian ini adalah apa penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada saat terjadinya perang dagang AS – Tiongkok 2018.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada saat terjadinya perang dagang AS – Tiongkok 2018.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional, serta diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya terutama pada isu ekonomi AS pasca dimulainya perang dagang AS – Tiongkok yang terjadi pada tahun 2018.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembuat kebijakan, terutama di Departemen Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri terkait kondisi ekonomi suatu negara.

### 1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk memberikan informasi terkait penelitian terdahulu yang akan dijadikan rujukan oleh penulis dalam menjalankan penelitian. Beberapa bahan bacaan yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya adalah:

Tulisan pertama adalah artikel jurnal yang berjudul “*US-China Trade Relationship under Biden Administration: a Theoretical Prediction*”, yang ditulis oleh Md Sajjad Hosein melalui *International Journal of New Political Economy*.<sup>11</sup> Tulisan ini menyajikan upaya untuk memprediksi secara teoritis hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok di bawah pemerintahan Joe Biden (Biden) yang dimulai pada tahun 2020. Tulisan ini menjelaskan bahwa Tiongkok akan tetap ditekan oleh AS di bidang perdagangan pada era Biden. Hal ini dikarenakan hasil dari kepentingan nasional AS dan adanya kekhawatiran AS terhadap kebangkitan Tiongkok. Tulisan ini juga memprediksi bahwa Tiongkok akan maju untuk

---

<sup>11</sup> Md Sajjad Hosein, “US-China Trade Relationship under Biden Administration: a Theoretical Prediction”, *International Journal of New Political Economy*, 2(2): 229-237 (2021)



menggantikan status AS sebagai kekuatan ekonomi dunia, sehingga konflik perang dagang antara AS dan Tiongkok tetap akan bertahan selama pemerintahan Biden meskipun tidak seagresif pemerintahan Trump.

Tulisan ini juga menjelaskan tentang ketegangan antara AS dan Tiongkok yang kemungkinan akan berlanjut di era pemerintahan Biden dengan melihat bagaimana Biden tetap memberlakukan tarif terhadap produk dan teknologi dari Tiongkok yang telah dikenakan sebelumnya pada masa pemerintahan Trump. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa Biden tetap akan mengikuti kebijakan yang diambil oleh Trump, namun diharapkan bahwa Biden dapat dengan realistis melihat ketegangan bilateral antara AS dan Tiongkok dengan mempertimbangkan kepentingan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun pemerintahan Biden sebagian besar akan mengikuti kebijakan yang dulu, diharapkan kebijakan dan tindakan lebih praktis dan dapat dipertanggungjawabkan dari pemerintahan sebelumnya.

Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan pandangan awal bagi penulis untuk melihat bagaimana hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok pada masa pemerintahan Biden selama berlangsungnya perang dagang dari tahun 2018. Dengan melihat ketegangan antara AS dan Tiongkok yang masih berlanjut meskipun sudah berganti presiden, penulis dapat menganalisis apa yang menjadi penyebab turunnya ekspor AS terhadap Tiongkok sehingga menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok pada masa perang dagang tahun dari 2018 yang terjadi pada dua pemerintahan presiden yang berbeda.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada subjek utama yang dianalisis. Tulisan ini lebih menjelaskan bagaimana perang dagang pada era pemerintahan Biden yang lebih mengedepankan multilateralisme serta bagaimana pemerintahan Biden menyikapi hubungan AS dan Tiongkok yang telah memburuk sejak masa pemerintahan Trump. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan lebih membahas bagaimana perang dagang antara AS dan Tiongkok berdampak pada neraca perdagangan kedua negara tersebut. Secara spesifik, penulis akan mengkaji apa penyebab defisitnya neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok dalam periode perang dagang yang terjadi sejak tahun 2018. Berbeda dengan tulisan ini yang hanya fokus melihat kelanjutan perang dagang pada masa pemerintahan Biden saja.

Tulisan kedua adalah artikel jurnal yang berjudul "*Trump's Trade War: An Indian Perspective*" yang ditulis oleh Prema-chandra Athukorala.<sup>12</sup> Tulisan ini membahas tentang implikasi dari kebijakan perdagangan AS pada pemerintahan Trump terhadap hubungan AS - India dengan latar belakang ekonomi India dan hubungan politik ekonomi kedua negara tersebut. Strategi Trump yang menggunakan tarif sebagai alat tawar-menawar dalam ekonomi bilateral dengan India, sementara mengabaikan kepentingan geopolitik bersama, bertepatan juga dengan kecenderungan proteksionis di India di bawah strategi "*Make in India*" dari pemerintah Modi, sehingga hal ini menyebabkan sengketa perdagangan bilateral yang berlarut-larut di antara kedua negara tersebut. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang Trump yang menghentikan India sebagai negara berkembang

---

<sup>12</sup> Prema-chandra Athukorala, "Trump's Trade War: An Indian Perspective", Arndt-Corden Department of Economics, Australian National University.

penerima bantuan *Generalized System of Preferences* (GSP) yang merupakan kebijakan AS dalam memberikan keringanan bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara berkembang. Tulisan ini menjelaskan bahwa penghapusan GSP kemungkinan akan memiliki lebih banyak pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi India karena ekspor di bawah program tersebut sangat besar bagi India.

Selanjutnya tulisan ini menjelaskan bahwa perang dagang yang terjadi antara AS dan India juga berujung pada pengaduan AS kepada WTO atas subsidi ekspor manufaktur India, hal ini dikarenakan pada saat itu AS mengalami defisit perdagangan dengan India, sehingga ini berpengaruh pada hubungan mitra strategis kedua negara. Perang dagang antara AS dan India dimulai pada 23 Januari 2018 dimana AS mengenakan tarif terhadap impor sel surya dan panel dari AS dan berlanjut pada pengenaan tarif perlindungan lain dalam hubungan perdagangan bilateral antara AS dan India. Tarif perlindungan yang dikenakan AS untuk baja dan aluminium telah berdampak cukup besar terhadap India. Namun pada akhirnya tarif perlindungan ini juga menyebabkan naiknya harga baja untuk perusahaan AS, sehingga menempatkan industri manufaktur AS di posisi yang kurang menguntungkan.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam melihat apa penyebab terjadinya perang dagang antara AS dan India dalam menambah sudut pandang penulis yang membahas mengenai perang dagang antara AS dan Tiongkok. Tulisan ini juga berkontribusi dalam melihat apa saja upaya yang dilakukan oleh India dalam menghadapi kebijakan proteksi milik Trump pada saat itu. Tulisan ini secara khusus juga membahas bagaimana kebijakan proteksi Trump

dibalik slogan “*American First*” juga bertabrakan dengan kebijakan negara lain yang menjadi mitra strategisnya dalam perdagangan, salah satunya India. Maka kasus awal yang terjadi antara perang dagang AS dan India juga memiliki kesamaan dengan perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok, yaitu adanya kebijakan proteksi Trump yang merasa bahwa AS telah dirugikan karena adanya defisit perdagangan. Selain itu, tulisan ini juga berkontribusi dalam melihat bagaimana perang dagang antara AS dan Tiongkok pada akhirnya juga ikut mempengaruhi dampak perdagangan antara India dan Tiongkok, maka dapat dilihat bahwa perang dagang yang terjadi antara dua negara memiliki banyak sekali implikasi terhadap perdagangan dengan negara lain serta dapat menyebabkan munculnya perang dagang dengan negara-negara lain.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada negara yang melakukan perang dagang dengan AS. Penelitian ini lebih fokus melihat adanya hubungan perdagangan strategis antara AS dan India yang awalnya bertujuan untuk membendung kebangkitan Tiongkok. Namun adanya gesekan antara kebijakan proteksionis Trump dan “*Make in India*” milik Modi pada akhirnya membuat hubungan perdagangan antara AS dan India mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari beberapa tarif perlindungan yang dikenakan oleh AS dan juga dikeluarkannya India dari daftar negara penerima bantuan GSP. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih membahas bagaimana perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok menyebabkan defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok.

Tulisan ketiga adalah artikel jurnal yang berjudul “*US-China Trade War: Causes and Outcomes*” yang ditulis oleh Larisa Kapustina, Ludmila Lipkova,

Yakov Silin, dan Andrei Drevalev.<sup>13</sup> Tulisan ini mengulas tentang kronologi perang dagang 2018 dan menganalisis penyebab dan kemungkinan konsekuensi yang ditimbulkan dari perang dagang tersebut. Dalam tulisan ini, penulis telah mengidentifikasi empat alasan utama yang menyebabkan terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok pada tahun 2018, yaitu: a) adanya niat AS dalam mengurangi defisit perdagangan bilateral dan meningkatkan jumlah pekerjaan; b) membatasi akses perusahaan Tiongkok ke teknologi AS dan mencegah modernisasi digital di Tiongkok; c) untuk mencegah pertumbuhan kekuatan militer Tiongkok; d) untuk mengurangi defisit anggaran federal. Selain itu, melalui tulisan ini juga menyimpulkan bahwa perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok tidak memiliki pemenang.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu melihat bagaimana awal mula terjadinya perang dagang yang diinisiasi lebih dulu oleh AS, serta bagaimana perang dagang tersebut dijadikan sebagai alat politik namun akhirnya mengakibatkan memburuknya ekonomi AS. Tulisan ini akan menjadi referensi utama yang penulis gunakan dalam melihat bagaimana kronologi terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok, bagaimana perang dagang menjadi alat politik AS dalam menahan kebangkitan Tiongkok baik di bidang militer maupun ekonomi, serta melihat bagaimana pada akhirnya perang dagang merugikan kedua negara yang terlibat.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada fokus utama penulis yang ingin menganalisis apa yang menyebabkan

---

<sup>13</sup> Larisa Kapustina, Ludmila Lipkova, Yakov Silin, dan Andrei Drevalev, "US-China Trade war: Causes and Outcomes", SHS Web of Conferences (2020). DOI:73.01012.10.1051/shsconf/20207301012.

terjadinya defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok pasca dimulainya perang dagang AS – Tiongkok pada tahun 2018. Sedangkan tulisan ini lebih membahas hasil dari perang dagang secara keseluruhan dan juga pada akhirnya melihat bahwa perang dagang ini sebagai salah satu alat dimensi politik AS dalam membendung pengaruh Tiongkok yang kemudian diharapkan dapat memperlambat pertumbuhan kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok. Selain itu perbedaan yang paling utama terletak pada kesimpulan tulisan ini yang menyatakan bahwa perang dagang antara AS dan Tiongkok tidak memiliki pemenang. Sementara penulis melihat adanya kegagalan AS dalam perang dagang yang terlihat dari defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok, sementara Tiongkok justru mengalami surplus pada neraca perdagangannya terhadap AS selama perang dagang berlangsung.

Tulisan keempat merupakan artikel jurnal yang berjudul "*The Impact of Sino - US Trade War on Chinese Industrial Structure and Countermeasure*" yang ditulis oleh Man Sheng.<sup>14</sup> Tulisan ini menjelaskan tentang perang dagang AS dan Tiongkok yang berakibat besar pada perekonomian negara di seluruh dunia. Tulisan ini juga membahas mengenai mekanisme perang dagang AS dan Tiongkok terhadap struktur industri dan memberikan beberapa rekomendasi atau saran terkait hal tersebut. Pada bagian awal tulisan ini menjelaskan tentang meningkatnya volume perdagangan antara AS dan Tiongkok sejak Tiongkok bergabung dengan WTO pada tahun 2001. Tulisan ini juga memaparkan data terkait peningkatan perdagangan bilateral antara AS dan Tiongkok yang dimulai pada tahun 2017, ketika AS telah menjadi mitra dagang terbesar kedua Tiongkok (setelah Uni Eropa),

---

<sup>14</sup> Man Sheng, "The Impact of Sino-US Trade War on Chinese Industrial Structure and Countermeasure", Atlantis Press, Advances in Intelligent System Research, vol 163 (2018).

sementara Tiongkok adalah mitra dagang terbesar pertama AS pada saat itu. Selanjutnya tulisan ini juga membahas tentang dampak dari perang dagang terhadap perekonomian Tiongkok dimana adanya dampak negatif perang dagang yang akan menghambat industri Tiongkok.

Tulisan ini merekomendasikan beberapa cara untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif yang diterima oleh Tiongkok selama berlangsungnya perang dagang dengan AS. Yaitu dengan terus mempromosikan *Belt Road Initiative* (BRI) sebagai strategi unggulan Tiongkok untuk memperluas kerjasama dengan berbagai negara, selain itu juga dengan cara memperkuat pembangunan zona perdagangan bebas dengan negara tetangga, dan mengembangkan hubungan perdagangan multilateral. Tulisan ini juga merekomendasikan agar pemerintah Tiongkok terus mencari peluang kerja sama perdagangan dengan berbagai mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor AS dan mengurangi dampak gesekan perdagangan terhadap perekonomian Tiongkok.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam melihat bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang dagang terhadap kedua negara, khususnya disini membahas dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian Tiongkok. Tulisan ini juga menjadi referensi utama bagi penulis dalam melihat bagaimana hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok sebelum terjadinya perang dagang. Tulisan ini juga menyajikan bagaimana peningkatan volume perdagangan antara AS dan Tiongkok sejak Tiongkok bergabung dengan WTO pada tahun 2001. Tulisan ini juga memberikan kontribusi dalam data-data terkait kedua negara yang menjadi partner dagang terbesar satu sama lain.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus analisis, dimana penulis fokus menganalisis penyebab terjadinya defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok pasca dimulainya perang dagang AS – Tiongkok tahun 2018. Sementara tulisan ini sebaliknya, yaitu menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang dagang terhadap perkembangan industri Tiongkok. Tulisan ini juga berpendapat bahwa Tiongkok menjadi negara yang lebih rentan terkena dampak negatif dari perang dagang dibandingkan dengan AS itu sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini juga merekomendasikan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Tulisan ini berkontribusi pada penelitian yang penulis lakukan terutama pada menyediakan data hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok dan bagaimana kedua negara terlibat perdagangan bilateral dengan menjadi mitra dagang terbesar bagi satu sama lain namun akhirnya berubah menjadi persaingan dalam perdagangan.

Tulisan kelima adalah artikel jurnal yang berjudul "*Macroeconomic Effects of Trade Tariffs: A Case Study of the U.S.-China Trade War Effects on the Economy of the United States*" yang ditulis oleh Sandra Žemaitytė dan Laimutė Urbšienė.<sup>15</sup> Tulisan ini menjelaskan tentang efek ekonomi makro dari tarif perdagangan dalam konteks konflik perdagangan baru-baru ini antara AS dan Tiongkok. Fokus dari tulisan ini terletak pada dua skenario perang dagang, dan salah satunya mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap arus perdagangan global. Setelah menerapkan model SMART ekuilibrium parsial, tulisan ini

---

<sup>15</sup> Sandra Žemaitytė dan Laimutė Urbšienė, "Macroeconomic Effects of Trade Tariffs: A Case Study of the U.S.-China Trade War Effects on the Economy of the United States", Vilnius University Press, Organizations and Markets in Emerging Economies, vol.11, no.2 (2020).



menyimpulkan bahwa semata-mata karena perang dagang dengan Tiongkok pada tahun 2020, total neraca perdagangan AS akan meningkat sebesar \$41.020 juta (0,21% dari PDB riil), sedangkan \$43.777 juta (0,22% PDB riil) dari impor AS. Selanjutnya, tulisan ini juga menjelaskan bahwa konsekuensi ekonomi potensial dari COVID-19 akan mengurangi dampak relatif dari perang dagang. Tulisan ini juga sampai pada kesimpulan bahwa AS merupakan negara yang diuntungkan dari perang dagang yang berlangsung dengan Tiongkok. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar AS yang lebih besar dan Tiongkok yang relatif lemah dalam tanggapan pembalasan tarif.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu memberikan sudut pandang baru terkait adanya dampak positif perang dagang terhadap perekonomian AS. Tulisan ini juga menyediakan data-data terkait kenaikan ekspor perdagangan AS terhadap Tiongkok atau sebaliknya. Selain itu, tulisan ini berkontribusi dalam memberikan gambaran bagaimana efek yang ditimbulkan oleh perang dagang terhadap perekonomian AS secara keseluruhan termasuk pada masa COVID-19.

Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan tulisan ini yaitu terlihat dari tulisan ini yang melihat bahwa ekonomi AS akan mendapat manfaat dari perang dagang, yang dapat dijelaskan dengan respons pembalasan Tiongkok yang relatif lemah. Namun demikian, menurut tulisan ini sektor pertanian dan otomotif AS akan paling mengalami penurunan sebagai dampak dari perang dagang. Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih melihat adanya dampak negatif dari perang dagang bagi AS yang dianalisis melalui penyebab terjadinya

defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok pasca dimulainya perang dagang AS – Tiongkok tahun 2018.

Tulisan keenam adalah artikel jurnal yang berjudul “Donald Trump’s Protectionist Trade Policy from the Perspective of Economic Nasionalism” yang ditulis oleh Azza Bimantara.<sup>16</sup> Tulisan ini menganalisis tentang kebijakan proteksionisme yang diberlakukan oleh Trump dalam segi politik yang dimiliki oleh negara demokratis. Tulisan ini juga menjelaskan tentang anomali yang muncul dari teori perdamaian demokratis yang melihat bahwa struktur dan norma yang dipegang oleh negara-negara demokratis bertujuan untuk mencegah mereka untuk terlibat dalam konfrontasi politik-keamanan dan ekonomi, namun nyatanya AS sebagai negara demokratis justru terlibat konfrontasi di bidang perdagangan melalui kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Trump. Artikel ini juga akan lebih menjelaskan tentang kebijakan perdagangan proteksionisme milik Trump dapat dianggap tidak hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional, namun juga sebagai upaya untuk melindungi kekuasaan politiknya.

Pada bagian isi, artikel ini menjelaskan tentang dialektika nasionalisme AS sebelum kepresidenan Trump hingga Trump menjabat. Tulisan ini menjelaskan bahwa Trump memobilisasi kaum konservatif kulit putih di AS untuk mendukungnya dan mendapatkan kursi kepresidenan. Selanjutnya tulisan ini juga berpendapat bahwa Trump dan pemerintahannya telah mendekonstruksi nasionalisme sipil AS dengan tradisi liberal. Artikel ini menggunakan perspektif

---

<sup>16</sup> Azza Bimantara, “Donald Trump’s Protectionist Trade Policy from the Perspective of Economic Nasionalism”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.7, N0.2 (2018-2019)

nasionalisme ekonomi dalam melihat kebijakan proteksi perdagangan Trump. Tulisan ini menjelaskan tentang tujuan nasionalis dalam aspek ekonomi dimana persatuan nasional membutuhkan ekonomi yang utuh dikarekana ekonomi dianggap sebagai instrumen negara dalam menghimpun kekuatan dan menggerakkan suatu bangsa. Dalam perspektif nasionalisme ekonomi tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan proteksionis perdagangan milik Trump dapat dianggap sebagai upaya mengamankan atau melindungi kekuatan politiknya, tidak hanya kekuatan ekonomi saja. Artikel ini juga menjelaskan bahwa kebijakan proteksionisme milik Trump telah mencederai struktur perdagangan internasional yang bebas dan adil.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian yang penulis lakukan adalah dalam melihat bagaimana kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Trump merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dan politik AS. Meskipun kebijakan proteksionisme tersebut tidak sesuai dengan teori perdamaian demokratik yang menyatakan bahwa struktur dan norma yang dianut oleh negara-negara demokratis mencegah mereka untuk terlibat dalam hubungan konfliktual baik secara politik maupun ekonomi. Namun pada dasarnya justru kebijakan proteksi AS tersebut memicu pembalasan yang dilakukan oleh negara lain sehingga AS terlibat hubungan ekonomi yang konfliktual dengan beberapa negara yang salah satunya adalah Tiongkok. Tulisan ini memberikan pandangan bahwa Trump melalui kebijakan proteksi tersebut berupaya untuk melindungi kepentingan AS dalam perdagangan internasional dan kemudian juga berkontribusi pada munculnya wacana nasionalisme Amerika kontemporer.

Tulisan ketujuh adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Wayne M. Morrison yang berjudul “*China – US Trade Issue*” yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan AS dan Tiongkok yang telah berkembang beberapa tahun terakhir.<sup>17</sup> Hubungan kedua negara tersebut yang ditandai dengan perdagangan telah dimulai sejak keduanya mengumumkan hubungan diplomatik pada tahun 1979 dan kemudian menandatangani perjanjian perdagangan bilateral ditahun yang sama. Tulisan ini menjelaskan bagaimana kedua negara menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain hingga pada akhirnya ini juga menyebabkan tingginya defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok setelah itu.

Tulisan ini juga memaparkan salah satu hal utama yang dianggap sebagai penyebab terbesar terjadinya defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok, yaitu adanya kebijakan *China’s pegged currency*. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang menjaga nilai mata uang yuan lebih rendah terhadap nilai mata uang negara lain. Hal ini dikarenakan Tiongkok dapat mempertahankan pematokan ini karena mata uangnya tidak dapat ditukar di pasar internasional sehingga juga dapat mengontrol transaksi modal yang akan dilaksanakan. Dengan adanya pematokan ini, nilai mata uang yuan tidak dipengaruhi pada kekuatan pasar. Hal inilah yang menyebabkan barang-barang impor milik Tiongkok menjadi lebih murah sedangkan barang AS yang diekspor ke Tiongkok menjadi lebih mahal, sehingga pada akhirnya menyebabkan defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian yang penulis lakukan adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pasak mata uang Tiongkok atau *china’s pegged*

---

<sup>17</sup> Wayne M. Morrison, “China-U.S. Trade Issues”, Congressional Research Service (2018).

*currency* pada akhirnya semakin dapat melemahkan nilai dolar sehingga berpengaruh pada ekspor AS ke Tiongkok dan menyebabkan terjadinya defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok. Selain itu, tulisan ini juga memberikan sudut pandang terkait kedua negara yang tetap melakukan perdagangan bilateral meskipun AS terus-menerus mengalami defisit perdagangan terhadap Tiongkok. Menurut Morrison, hal ini diakibatkan karena adanya perjanjian kedua negara dibawah *Strategic and Economic Dialogue* (SED) yang mengakibatkan semakin meningkatnya ketergantungan ekonomi kedua negara. Namun disini Morrison juga memaparkan bahwa menurut para analisis kebangkitan ekonomi Tiongkok merupakan salah satu bentuk ancaman bagi perekonomian AS dan perdagangan dunia, hal ini dikarenakan AS terus mengalami defisit perdagangan disetiap tahunnya dan juga beberapa negara lain di dunia.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang menulis lakukan terletak pada inti dari permasalahan yang akan dibahas. Tulisan ini melihat bahwa hubungan yang terjadi antara AS dan Tiongkok merupakan bentuk hubungan interdependensi atau saling ketergantungan yang salah satunya dibawah forum SED, sehingga dibawah forum tersebut hendaknya kedua negara tetap bekerjasama untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang dianggap penting meskipun dalam kondisi defisit perdagangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan lebih fokus untuk melihat apa yang menyebabkan terjadinya defisit perdagangan tersebut dengan lebih menganalisis *china's pegged currency* yang telah dipaparkan oleh Morrison.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Liberalisme

Perdagangan internasional merupakan metode interaksi ekonomi yang berbentuk pertukaran barang atau jasa yang melibatkan setidaknya dua negara yang berbeda. Dalam perdagangan internasional tersebut, terdapat dua jenis kebijakan yang digunakan, yaitu proteksionisme dan liberalisasi perdagangan. Proteksionisme merupakan suatu kebijakan yang membatasi perdagangan internasional melalui hambatan dalam perdagangan. Sementara liberalisasi perdagangan merupakan penghapusan atau pengurangan hambatan dalam perdagangan bebas antar negara.<sup>18</sup>

Proteksionisme lahir dari pemikiran merkantilisme yang melihat tentang hubungan antara aktivitas ekonomi dan kekuasaan negara. Kaum merkantilisme memiliki tiga argumen utama yang menjadi dasar awal dari pemikiran ini.<sup>19</sup> Pertama, merkantilisme melihat bahwa bahwa kekuasaan dan kekayaan nasional mempunyai keterkaitan yang erat di mana kekuasaan nasional dalam sistem negara internasional sebagian besar berasal dari kekayaan dan Kekayaan tersebut diperlukan untuk mengumpulkan kekuasaan. Kedua, kaum merkantilis klasik berpendapat bahwa perdagangan memberikan satu cara bagi suatu negara untuk memperoleh kekayaan dari luar negeri. Namun kekayaan dapat diperoleh melalui perdagangan hanya jika negara tersebut memiliki neraca perdagangan yang positif, yaitu jika negara tersebut menjual lebih banyak barang kepada orang asing daripada

---

<sup>18</sup> Jingyao Fu, "International Trade Liberalization and Protectionism: A Review", *Advances in Economics, Business and Management Research*, Atlantis Press International, vol 203 (2021)

<sup>19</sup> Jacob Viner, "Studies in the theory of international trade". London: Allen & Unwin (1960).

membeli dari orang asing. Ketiga, merkantilisme klasik melihat bahwa beberapa jenis kegiatan ekonomi lebih berharga dibandingkan jenis kegiatan ekonomi lainnya. Secara khusus, kaum merkantilis berpendapat bahwa kegiatan manufaktur harus dipromosikan, sedangkan kegiatan pertanian dan non-manufaktur lainnya harus dihindari.<sup>20</sup>

Ada beberapa argumen yang digunakan oleh merkantilisme dalam menerapkan kebijakan proteksionisme, yaitu argumen domestik seperti *infant industry argument*, melindungi pertahanan dan keamanan nasional, pendapatan pemerintah, dan perlindungan terhadap lapangan pekerjaan. Dan juga argumen internasional seperti ketentuan perdagangan dan neraca pembayaran.<sup>21</sup>

Argumen domestik diterapkannya kebijakan proteksionisme oleh suatu negara menurut merkantilisme dapat dilihat sebagai berikut.

### 1. *Infant Industry Argument*

*Infant Industry argument* adalah salah satu alasan tertua dan paling sering digunakan oleh suatu negara untuk menerapkan kebijakan proteksionisme. Argumen pertama dari *infant industry* yaitu dengan melihat bahwa industri domestik merupakan bagian dari keunggulan komparatif negara tersebut dalam jangka panjang, sehingga diterapkannya kebijakan proteksionisme bertujuan untuk melindungi industri tersebut sementara waktu agar perusahaan domestik dapat

---

<sup>20</sup> Thomas Oatley, "International Political Economy: Sixth Edition", Routledge, hlm.33, (2019). ISBN 978-1-351-034641.

<sup>21</sup> Arvid Lukauskas, Robert M. Stern, dan Gianni Zanini, "Handbook of Trade Policy for Development", Oxford University Press (2013), hlm.224-231.

mengejar ketertinggalan dan lebih kompetitif dibandingkan perusahaan asing. Argumen kedua dari *infant industry* adalah proteksionisme dapat mencegah industri domestik agar tidak bangkrut karena tekanan dari luar seperti persaingan dengan industri asing, seperti peningkatan produktivitas yang memungkinkan perusahaan asing menurunkan biaya produksinya, sehingga perlindungan sementara memungkinkan peningkatan output dan pengurangan biaya di masa depan yang cukup untuk membuat perusahaan domestik bertahan. Selanjutnya, ketika industri domestik telah mencapai keunggulan komparatif jangka panjang atau beradaptasi dengan tekanan dari luar, pemerintah harus menghilangkan hambatan impor dan membiarkan perusahaan domestik dan perusahaan asing untuk bersaing secara setara.

## 2. Melindungi Pertahanan dan Keamanan Nasional

Melindungi industri yang memproduksi barang-barang penting untuk pertahanan nasional atau untuk menghadapi keadaan darurat nasional adalah alasan yang populer untuk menerapkan hambatan impor, khususnya di negara-negara maju. Alasannya adalah bahwa negara harus mampu menghasilkan sendiri pasokan barang-barang tersebut agar tidak terputus pada saat-saat kritis, seperti saat terjadi perang. Argumen lainnya adalah membatasi ekspor barang-barang yang mungkin dapat membantu musuh potensial dalam meningkatkan kemampuan militer negara. Pemerintah di negara-negara berkembang juga menyebutkan kekhawatiran keamanan nasional atau kebutuhan untuk menjaga independensi politik sebagai motif untuk melindungi



sektor-sektor strategis, seperti keuangan, komunikasi, energi, dan pangan, dari persaingan impor atau investasi asing langsung.

### 3. Pendapatan Pemerintah

Pemerintah dapat menerapkan tarif atau pajak ekspor untuk meningkatkan pendapatan guna membiayai pengeluaran. Tarif merupakan hal yang menarik di negara-negara yang mengalami kesulitan, karena alasan administratif atau politik untuk meningkatkan pendapatan melalui cara perpajakan seperti pajak penghasilan, pertambahan nilai, atau penjualan, karena memungut bea atas barang-barang asing relatif mudah dan lugas. Secara historis, bea tarif telah menjadi sumber pendapatan penting di banyak negara, termasuk sebagian besar negara industri maju. Meskipun demikian, pemerintah menghadapi keterbatasan dalam jumlah pendapatan yang dapat mereka peroleh dengan cara ini: tingkat tarif yang tinggi menekan impor dan tarif yang mahal tidak menghasilkan pendapatan sama sekali.

### 4. Perlindungan Terhadap Lapangan Pekerjaan

Keinginan untuk melindungi lapangan pekerjaan merupakan motif yang kuat untuk melakukan perlindungan di banyak negara maju. Perusahaan-perusahaan dalam negeri yang menghadapi peningkatan impor biasanya harus menurunkan biaya atau tingkat produksinya, dan akibatnya para pekerja akan kehilangan pekerjaan. Jika impor berasal dari negara-negara yang upahnya lebih rendah, tuntutan terhadap hambatan impor akan meningkat karena pekerja rumah tangga akan

mengklaim bahwa mereka tidak mampu bersaing dengan pekerja asing yang berpenghasilan lebih rendah. Penggunaan hambatan impor untuk melindungi lapangan kerja kemungkinan besar terjadi di negara-negara dimana perusahaan industri milik negara memberikan lapangan kerja yang besar bagi penduduknya.

Sementara argumen internasional diterapkannya kebijakan proteksionisme oleh suatu negara menurut merkantilisme dapat dilihat sebagai berikut.

#### 1. Ketentuan Perdagangan

Argumen ketentuan perdagangan sebagai alasan untuk menerapkan kebijakan proteksionisme hanya berlaku ketika suatu negara merupakan konsumen atau pemasok suatu barang dalam jumlah besar sehingga negara tersebut mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga global melalui pengenaan tarif atau pajak ekspor, sehingga dapat memperbaiki keadaan tertentu. Kritik terhadap argumen ini adalah ketentuan perdagangan hanya berlaku pada beberapa situasi, karena negara jarang memiliki kekuatan pasar untuk mengubah harga dunia. Bahkan jika negara tersebut tetap melakukan proteksionisme sebagai bentuk ketentuan perdagangan, maka kekuasaan ini akan terbatas pada sejumlah kecil barang. Selain itu, penerapan tarif untuk meningkatkan persyaratan perdagangan dapat memicu pembalasan dari negara lain, yang berpotensi memicu perang dagang. Jika terjadi pembalasan, negara yang menerapkan tarif optimal kemungkinan besar akan mengalami

keadaan yang lebih buruk dibandingkan dalam situasi perdagangan bebas.

## 2. Neraca Pembayaran

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan akan perlindungan guna memperbaiki neraca pembayaran suatu negara telah menjadi hal yang lumrah. Penerapan hambatan perdagangan dimaksudkan untuk menghilangkan defisit neraca pembayaran dengan menekan impor. Namun kebijakan komersial merupakan cara yang tidak efektif untuk mengatasi defisit perdagangan. Kritik terhadap argumen ini adalah pandangan bahwa hambatan impor merupakan instrumen kebijakan yang berjalan lambat, karena volume impor biasanya tidak langsung turun sebagai respons terhadap kenaikan harga. Meskipun hambatan perdagangan mengurangi impor, hambatan tersebut juga menyebabkan penurunan ekspor dengan jumlah yang sama, sehingga tidak menyebabkan perubahan signifikan pada neraca pembayaran bersih. Oleh karena itu, defisit paling baik dikelola dengan cara lain, khususnya melalui penyesuaian kebijakan makroekonomi yang menyeimbangkan tabungan dan investasi serta belanja pemerintah dan perpajakan

Selanjutnya merkantilisme juga mengkritik kebijakan liberalisasi perdagangan milik liberalisme. Di mana liberalisme mendesak negara-negara berkembang dan *emerging market* untuk meliberalisasi perdagangan mereka sebanyak dan secepat mungkin. Liberalisme juga berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan alokasi sumber daya dan mengurangi kerugian

bobot mati, sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kritik merkantilisme terhadap kebijakan liberalisasi perdagangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.<sup>22</sup>

1. Liberalisasi perdagangan hanya akan mendorong pertumbuhan ketika kebijakan-kebijakan ekonomi utama negara tersebut memadai dan institusi-institusi dari negara tersebut juga kuat.
2. Lonjakan impor setelah liberalisasi perdagangan dapat menghancurkan sektor-sektor utama negara, sehingga memperburuk pengangguran dan memperlambat pertumbuhan.
3. Penggunaan hambatan perdagangan secara strategis untuk melindungi *infant industry* mungkin lebih diperlukan jika negara-negara berkembang ingin mampu mengubah perekonomiannya mereka dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri.
4. Liberalisasi sektoral bisa berbahaya jika negara-negara maju tetap membatasi produk-produk yang penting bagi negara-negara berkembang.

Sementara itu, liberalisme dengan kebijakan liberalisasi perdagangannya muncul untuk menantang dan mengkritik merkantilisme. Liberalisme juga memiliki tiga argumen yang menantang ketiga argumen milik merkantilisme. Pertama, liberalisme berusaha menarik garis tegas antara politik dan ekonomi. Liberalisme berpendapat bahwa tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk

---

<sup>22</sup> Arvid Lukauskas, Robert M. Stern, dan Gianni Zanini, op.cit, hlm 7

memperkaya individu, bukan untuk meningkatkan kekuasaan negara. Kedua, liberalisme berpendapat bahwa negara-negara tidak memperkaya diri mereka sendiri dengan melakukan surplus perdagangan. Sebaliknya, negara-negara memperoleh keuntungan dari perdagangan terlepas dari apakah neraca perdagangannya positif atau negatif. Ketiga, suatu negara tidak serta merta menjadi lebih kaya dengan memproduksi barang-barang manufaktur dibandingkan dengan memproduksi komoditas primer. Sebaliknya, menurut liberalisme, negara-negara menjadi lebih kaya dengan membuat produk-produk yang dapat mereka produksi dengan biaya yang relatif rendah di dalam negeri dan menukarkannya dengan barang-barang yang hanya dapat diproduksi di dalam negeri dengan biaya yang relatif tinggi.<sup>23</sup>

Selain menentang intervensi besar negara seperti yang dianjurkan oleh kaum merkantilis, liberalisme juga mendukung sistem alokasi sumber daya berbasis pasar. Dengan mengutamakan kesejahteraan individu, liberalisme berpendapat bahwa kesejahteraan sosial akan mencapai puncaknya ketika masyarakat bebas mengambil keputusan sendiri tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Jadi, daripada menerima argumen merkantilis yang menyatakan bahwa negara harus mengatur alokasi sumber daya, kaum liberal berpendapat bahwa sumber daya harus dialokasikan melalui transaksi sukarela berbasis pasar antar individu. Pertukaran seperti itu saling menguntungkan selama dilakukan secara sukarela, di mana kedua belah pihak dalam transaksi apa pun akan mendapatkan keuntungan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Thomas Oatley, op.cit. hlm 34

<sup>24</sup> Thomas Oatley, op.cit. hlm 35

Liberalisme juga mengkritik argumen yang digunakan oleh merkantilisme sebagai alasan dalam menerapkan kebijakan proteksionisme. Kritik liberalisme terhadap argumen tersebut yaitu :<sup>25</sup>

1. Kritik liberalisme terhadap argumen *infant industry* sebagai alasan utama dalam penerapan kebijakan proteksionisme, di mana strategi *infant industry* yang pada praktiknya tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan yang dilindungi dalam argumen industri bayi ini menikmati keuntungan yang terjamin dan meyakini bahwa pemerintah akan enggan menghilangkan hambatan impor karena takut kehilangan lapangan pekerjaan. Sehingga perlindungan yang berlebihan dapat menyebabkan perusahaan ini kurang termotivasi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Oleh karena itu, beberapa tahun setelah penerapan hambatan impor, perusahaan sering kali tidak mampu bersaing secara internasional.
2. Kritik liberalisme terhadap tujuan penerapan kebijakan proteksionisme sebagai upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan nasional suatu negara. Liberalisme melihat bahwa alasan menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi pertahanan dan keamanan nasional akan mudah disalahgunakan. Banyak industri yang menganggap dirinya penting bagi pertahanan nasional dan akan menuntut perlindungan. Selain itu, argumen ini mengabaikan kemungkinan bahwa barang-barang penting dapat disimpan terlebih dahulu atau dibeli dari negara sahabat jika terjadi

---

<sup>25</sup> Arvid Lukauskas, Robert M. Stern, dan Gianni Zanini, op.cit. hlm 224-231.

permusuhan atau keadaan darurat lainnya. Pemerintah juga dapat mensubsidi produksi barang-barang yang dianggap penting lalu kemudian memastikan kecukupan pasokan dan mempertahankan kapasitas produktif. Akibatnya, sebagian besar pemerintah tidak terlalu bergantung pada pendapatan tarif karena kebutuhan pendanaan mereka semakin besar dan mereka mengembangkan kapasitas administratif untuk menerapkan bentuk perpajakan langsung yang lebih efisien. Selain itu, masih sedikit bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan asing mengambil keputusan yang lebih merugikan kepentingan nasional di sektor-sektor yang disebut strategis.

3. Kritik liberalisme terhadap tujuan penerapan kebijakan proteksionisme untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Liberalisme melihat bahwa pengenaan tarif sebagai sumber pendapatan pemerintah dapat menimbulkan beban mati konsumsi dan produksi. Di mana tarif bukanlah cara terbaik untuk meningkatkan pendapatan, terutama ketika kebutuhan pendapatan pemerintah lebih besar.
4. Kritik liberalisme terhadap tujuan proteksionisme sebagai bentuk perlindungan terhadap lapangan pekerjaan. Menurut liberalisme, kebijakan proteksionisme tidak akan dapat melindungi lapangan pekerjaan. Justru sebaliknya, persaingan impor dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan menimbulkan biaya yang lebih besar, seperti biaya untuk relokasi atau pelatihan ulang para pekerja. Memberikan kompensasi kepada pekerja yang menganggur melalui pembayaran sekaligus atau pelatihan ketenagakerjaan publik merupakan cara yang jauh lebih baik untuk mengelola dampak perdagangan yang mengganggu. Kebijakan-kebijakan ini tidak

menimbulkan biaya konsumsi atau produksi yang berkaitan dengan hambatan perdagangan dan tidak menghalangi kemampuan perdagangan untuk menciptakan lapangan kerja baru di seluruh perekonomian.

5. Kritik liberalisme terhadap penerapan kebijakan proteksionisme guna memperbaiki neraca perdagangan suatu negara. Liberalisme berpendapat bahwa kebijakan komersial merupakan cara yang tidak efektif untuk mengatasi defisit perdagangan. Hambatan impor merupakan instrumen kebijakan yang berjalan lambat, karena volume impor biasanya tidak langsung turun sebagai respons terhadap kenaikan harga. Meskipun hambatan perdagangan mengurangi impor, hambatan tersebut juga menyebabkan penurunan ekspor dengan jumlah yang sama, sehingga tidak menyebabkan perubahan signifikan pada neraca pembayaran bersih. Oleh karena itu, defisit paling baik dikelola dengan cara lain, khususnya melalui penyesuaian kebijakan makroekonomi yang menyeimbangkan tabungan dan investasi serta belanja pemerintah dan perpajakan.

Selanjutnya, Douglas A. Irwin yang merupakan salah satu pemikir liberalisme ekonomi mengkritik kebijakan proteksionisme Trump dalam tulisannya yang berjudul “The False Promise of Protectionism: Why Trump’s Trade Policy Could Backfire”<sup>26</sup>. Di dalam tulisan tersebut, Irwin menjelaskan ada tiga faktor yang menjadi tujuan dari kebijakan proteksionisme yang tidak tercapai sehingga menyebabkan kebijakan proteksionisme menjadi tidak efektif. Faktor tersebut yaitu :

---

<sup>26</sup> Douglas A. Irwin, “The False Promise of Protectionism: Why Trump’s Trade Policy Could Backfire”, *Foreign Affairs* 96, No.3 (2017): 45-46.



### *1. Revitalize Basic Manufacturing Industries*

Hambatan perdagangan atau proteksionisme salah satunya ditujukan untuk merevitalisasi industri manufaktur dasar yang terpuruk. Namun disini Irwin menjelaskan bahwa proteksionisme akan gagal untuk mencapai tujuan tersebut yang ia dasarkan pada kebijakan proteksionisme pemerintahan Reagan yang memberlakukan banyak hambatan perdagangan. Menurut Irwin, pada masa itu pemerintahan Reagan memberlakukan banyak hambatan perdagangan yang tampaknya membantu industri dalam negeri mengatasi meningkatnya persaingan asing. AS pada masa itu menekan Jepang agar setuju untuk mengurangi ekspor mobilnya, memaksa pemasok asing untuk membatasi ekspor baja mereka, dan melakukan negosiasi mengenai pengaturan baru yang membatasi impor tekstil dan pakaian jadi. Karena perekonomian pulih dan lapangan kerja meningkat, pemerintah pada saat itu menegaskan bahwa pembatasan impor di era Reagan berhasil. Namun penilaian itu bertentangan dengan bukti dalam laporan pada tahun 1982, Komisi Perdagangan Internasional AS menemukan bahwa sebagian besar industri yang menerima keringanan perdagangan mengalami penurunan jangka panjang sehingga pembatasan impor tidak dapat dibatalkan. Sehingga dapat dilihat bahwa pembatasan perdagangan telah gagal mencapai tujuannya yaitu merevitalisasi industri tersebut.

### *2. Create New Manufacturing Jobs*

Menurut Irwin, salah satu tujuan dari diterapkannya kebijakan proteksionisme adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru di bidang manufaktur. Pada tulisannya, Irwin menjelaskan bahwa jika perlindungan perdagangan berhasil membantu beberapa produsen dalam negeri dengan mengorbankan produsen lain, namun sebuah ilusi jika hal tersebut akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru di bidang manufaktur, terutama bagi pekerja berketerampilan rendah. Hal ini terlihat dari kasus ketika pemerintahan Obama memberlakukan bea khusus pada ban yang diimpor dari Tiongkok pada tahun 2009, kebijakan ini menyelamatkan paling banyak hanya sekitar 1.200 pekerjaan dengan mengorbankan kerugian bagi konsumen dalam bentuk harga ban yang lebih tinggi. Irwin juga menjelaskan bahwa tidak ada negara yang dapat melindungi lapangan pekerjaan di masa lalu tanpa kehilangan lapangan pekerjaan di masa depan dengan menggunakan kebijakan proteksionisme. Irwin juga menjelaskan data dari Departemen Perdagangan AS yang memperkirakan 11,5 juta pekerjaan di AS didukung oleh ekspor. Pekerjaan-pekerjaan tersebut cenderung memberikan upah di atas rata-rata untuk ekspor manufaktur, dan akan terancam jika AS mulai mengenakan pajak atas impor.

### 3. *Reduce the Trade Deficit*

Irwin menjelaskan bahwa proteksionisme sering diusulkan sebagai cara untuk mengurangi defisit perdagangan. Meskipun AS mengalami surplus perdagangan ketika menerapkan Tarif Smoot-Hawley, namun ekspor turun seiring dengan impor dan neraca perdagangan tidak

mengalami perubahan. Selanjutnya pada tahun 1980-an, defisit perdagangan juga terus mengalami peningkatan meskipun ada tindakan proteksionisme dari pemerintahan Reagan. Irwin berpendapat bahwa defisit perdagangan tidak terpengaruh oleh pembatasan impor, khususnya di era nilai tukar mengambang, karena defisit ini tidak ditentukan oleh kebijakan perdagangan namun oleh aliran modal bersih yang masuk ke AS. Irwin juga menjelaskan pendapat para ekonom yang menjelaskan bahwa dolar adalah mata uang cadangan dunia dan mata uang yang paling mendekati aset aman dalam sistem keuangan global, maka permintaan asing terhadap aset dalam mata uang dolar akan tetap kuat. Permintaan yang terus berlanjut terhadap aset AS tersebut berarti bahwa negara-negara lain akan tetap menggunakan sebagian pendapatan dolar mereka untuk membeli aset-aset AS, bukannya barang AS. Ini berarti bahwa AS akan terus membeli lebih banyak barang dari negara lain dibandingkan dengan membeli barang dari negara tersebut.

Melalui teori liberalisme yang mendukung praktik perdagangan bebas dan mengkritik proteksionisme, maka penulis akan menggunakan pendekatan yang mengkritik proteksionisme sebagai konsep utama. Penulis akan menggunakan tiga faktor tujuan proteksionisme yang tidak tercapai oleh Douglas A. Irwin dalam melihat apa saja penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada saat terjadinya perang dagang AS – Tiongkok 2018. Selain itu, konsep ini juga akan membantu penulis dalam menganalisis mengapa kebijakan proteksionisme tidak tepat digunakan untuk menangani defisit perdagangan yang terjadi di AS dari sebelum perang dagang hingga perang dagang berlangsung.

Konsep ini dapat digunakan karena tiga faktor yang menjadi tujuan proteksionisme tidak tercapai pada perang dagang AS – Tiongkok 2018 sehingga menyebabkan kebijakan proteksionisme AS menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuannya.

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan atau metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan atau berorientasi pada fenomena yang bersifat alamiah, sehingga tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan.<sup>27</sup> Hal yang bersifat alami dapat dimaknai dengan hal yang terjadi sebegitu adanya tanpa rekayasa, sesuai dengan topik penelitian penulis yang membahas tentang perekonomian suatu negara.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Hossein Nassaji, deskriptif analitis yaitu merupakan jenis penelitian yang akan memberikan gambaran isu secara menyeluruh dengan melibatkan semua data dalam penelitian sehingga bertujuan mendapatkan analisis yang lebih dalam terkait subjek yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam mengimplementasikan jenis penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi sumber data yang menggambarkan dan menjabarkan penyebab terjadinya defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok pasca dimulainya perang dagang AS – Tiongkok tahun 2018.

---

<sup>27</sup> D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

<sup>28</sup> Hossein Nassaji, *Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis* (Language, 2015)

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan fokus dalam melihat apa penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada saat terjadinya perang dagang AS – Tiongkok tahun 2018 hingga 2022. Masalah dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2018 dimana awal mula terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok pada masa pemerintahan Trump. Sementara 2022 akan penulis jadikan sebagai tahun akhir penelitian karena telah mencakup dua tahun masa pemerintahan Biden dan perang dagang ini masih berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu, semua data yang penulis gunakan dalam penelitian akan penulis batasi pada masa perang dagang yang dimulai pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2022.

### **1.8.3 Unit Analisis dan Tingkat Analisis**

Dalam bukunya, Mochtar Mas'ood menjelaskan bahwa unit analisis merupakan suatu variabel dependen yang harus dideskripsikan atau dijelaskan dalam suatu penelitian. Sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis yang akan digunakan atau disebut sebagai variabel independen.<sup>29</sup> Unit analisis dalam penelitian ini adalah proteksionisme AS terhadap Tiongkok. Sedangkan unit eksplanasinya adalah defisit perang dagang AS – Tiongkok tahun 2018.

Selanjutnya menurut Kenneth N. Waltz, ada tiga tingkatan dalam menganalisis masalah dalam hubungan internasional, yaitu individu, kelompok, dan sistem internasional. Tingkatan individu berfokus pada tindakan manusia,

---

<sup>29</sup> Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi., 1st ed. (Jakarta: LP3ES, 1990).

tingkatan negara lebih berkonsentrasi pada faktor domestik di dalam negara tersebut, sedangkan tingkatan sistem internasional lebih menekankan pada karakteristik sistem internasional.<sup>30</sup> Sedangkan level analisis dari penelitian ini adalah negara, karena yang akan penulis teliti yaitu penyebab defisitnya neraca perdagangan AS.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau *library research*. Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian.<sup>31</sup> Studi kepustakaan pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data atau informasi yang relevan dengan penelitian melalui buku, artikel jurnal, berita, dan website yang menunjang data-data terkait penyebab terjadinya defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok pasca dimulainya perang dagang tahun 2018. Sumber-sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Yang pertama, penulis menggunakan buku Kenneth N. Waltz yang berjudul “*Theory of International Politics*”. Selanjutnya, penulis menggunakan laporan resmi seperti *Economics Working Paper Series 2017* yang berjudul “*Can Protectionism Improve Trade Balance?*” yang dikeluarkan oleh U.S. International Trade Commission, kemudian penulis juga menggunakan working paper yang

---

<sup>30</sup> Kenneth N. Waltz, “*Theory of International Politics*”, University of California Berkeley (1979)

<sup>31</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

berjudul “*U.S. Trade with China*” yang dikeluarkan oleh Bureau of Industry and Security U.S. Department of Commerce, dan NBER Working Paper Series yang berjudul “*The Dynamics of the U.S. Trade Balance and Real Exchange Rate: The J Curve and Trade Cost*” yang dikeluarkan oleh National Bureau of Economic Research. Laporan resmi ini berkontribusi dalam menyediakan data statistik terkait ekspor dan impor AS dan Tiongkok berdasarkan tahun dan jenis barang.

Selanjutnya penulis menggunakan artikel jurnal seperti International Journal of New Political Economy yang ditulis oleh Md. Sajjad Hosein dengan judul “*US – China Trade Relationship under Biden Administration*”, kemudian juga menggunakan artikel dari jurnal The North American Review yang ditulis Charles J. Bullock dengan judul “*The Theory of The Balance of Trade*”, dan juga menggunakan artikel dari European Journal of Economic and Economic Policies yang ditulis oleh Robert A Blecker dengan judul “*The US Economy Since the Crisis: Slow Recovery and Secular Stagnation*”. Dan yang terakhir, penulis juga menggunakan situs web dari <https://www.bbc.com/news>, <https://www.nytimes.com/international/>, <https://edition.cnn.com/>, <https://thediplomat.com/>, <https://tradingeconomics.com>, dan <https://statistika.com/>. Situs web ini digunakan sebagai sumber berita terbaru yang memberikan lebih banyak data terkait penelitian penulis.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Miles, Huberman dan Saldana, teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan atau proses yang terjadi secara bersamaan, yang pertama yaitu *data condensation* atau kondensasi data, yang kedua yaitu *data display* atau menyajikan data, dan yang ketiga yaitu *conclusion drawing and verification* atau

menarik kesimpulan dan verifikasi.<sup>32</sup> Ketiga tahapan tersebut penulis gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini.

Tahap pertama yaitu *data condensation* atau kondensasi data merupakan suatu proses yang merujuk pada adanya pemilihan, pengerucutan, penyederhanaan, peringkasan, dan transformasi data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok pada masa terjadinya perang dagang. Lalu penulis akan lebih mengerucutkan lagi data yang telah ditemukan dengan memfokuskan pada apa yang menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok pasca dimulainya perang dagang AS – Tiongkok tahun 2018. Selanjutnya, data yang telah penulis temukan akan dilakukan penyederhanaan dan peringkasan sehingga menghasilkan data yang memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

Tahap kedua yaitu *data display* atau penyajian data yang merupakan suatu proses adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan dari sekumpulan informasi yang telah dikondensasi. Data yang sebelumnya telah dikondensasi akan penulis paparkan dalam bentuk kalimat penelitian yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam tahapan ini, penulis juga akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif deskriptif yang terlihat dari pemaparan BAB I hingga BAB IV yang membahas tentang kegagalan Amerika Serikat dalam meningkatkan neraca perdagangan terhadap Tiongkok pasca dimulainya perang dagang tahun 2018.

---

<sup>32</sup> Johnny saldana Matthew B. Miles , Huberman, Michael, *Qualitatif Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (London: SAGE, 2014).



Tahap terakhir yaitu *conclusion drawing and verification* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan suatu proses dimana dilakukan kembali pengecekan ulang terhadap data yang telah dianalisis. Pada penelitian ini, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang penulis lakukan terdapat pada BAB V, yaitu berbentuk penekanan kembali hasil dari penelitian mengenai apa yang menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok pasca dimulainya perang dagang AS – Tiongkok tahun 2018. Tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi data diharapkan dapat memberikan penegasan ulang terkait hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT – TIONGKOK DAN PERANG DAGANG 2018**

Bab ini berisikan tentang bagaimana hubungan antara AS dan Tiongkok baik secara perpolitikan maupun perdagangan sebelum terjadinya perang dagang, saat terjadinya perang dagang, dan setelah terjadinya perang dagang 2018. Bab ini akan dimulai dengan membahas sejarah hubungan bilateral antara AS dan Tiongkok, bagaimana hubungan dagang kedua negara hingga saat ini. Selanjutnya bab ini juga akan membahas konflik yang terjadi antara AS dan

Tiongkok serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara pada masa pemerintahan Trump dan Biden.

### **BAB III : KONDISI EKONOMI POLITIK AMERIKA SERIKAT PASCA PERANG DAGANG**

Bab ini akan membahas tentang kondisi ekonomi politik AS sebelum perang dagang, saat perang dagang, dan yang terpenting adalah bagaimaa kondisi Amerika Serikat pasca terjadinya perang dagang. Selanjutnya bab ini akan membahas mengenai kondisi politik dan ekonomi AS setelah perang dagang yang dilengkapi dengan data-data defisit perdagangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS.

### **BAB IV : ANALISIS PENYEBAB TIDAK EFEKTIFNYA KEBIJAKAN PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT TERHADAP TIONGKOK PADA PERANG DAGANG AS – TIONGKOK 2018**

Bab ini akan berisikan analisis terkait apa saja faktor yang menjadi penyebab kegagalan kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada perang dagang AS – Tiongkok 2018. Bab ini juga akan dianalisis dengan tiga faktor penyebab ketidakefektifan kebijakan proteksi oleh Douglas A. Irwin.

### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisikan tentang rangkuman kesimpulan dari penelitian serta saran secara umum dalam penelitian yang telah dilakukan yang berfokus pada penyebab kegagalan kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada perang dagang AS – Tiongkok 2018.